



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
GUBERNUR DIY

KPAA PAKU ALAM X
WAKIL GUBERNUR DIY



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda D.I. Yogyakarta), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemda D.I. Yogyakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemda D.I. Yogyakarta tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan ketepatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 218/713.HP/DPK-K-Y. YOGYAKARTA/04/10/2026 tanggal 16 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 16 April 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan D.I. Yogyakarta
Ketanggasan Jawab Pemeriksaan
Muhlis Sugihartiko, S.E., M.M.,
CRCM, CRCB, CRMP, CSFA, ERMAP, CBAF, CFA
Register CSFA Nomor R.00130

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemda D.I. Yogyakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa memperhitungkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemda D.I. Yogyakarta untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemda D.I. Yogyakarta.

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

iii

Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Reff	2025	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	1.541.673.476.325,25	2.157.532.293.945,00	(615.858.817.619,75)	(28,54)
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	73.198.120.578,22	75.872.874.116,21	(2.674.753.537,99)	(3,61)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	274.150.105.850,78	66.372.413.217,87	207.777.692.632,91	313,05
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	84.918.988.418,91	74.244.383.694	10.674.604.724,91	(14,50)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.5	1.973.969.771.172,26	2.428.318.856.852,52	(454.349.085.680,26)	(18,50)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	3.021.146.926.530,00	3.507.899.183.472,00	(486.552.256.942,00)	(13,87)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	980.925.631,00	983.805.230,00	(2.879.599,00)	(0,29)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2.3	3.022.127.853.161,00	3.508.682.988.702,00	(486.555.135.541,00)	(13,87)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	657.005.502.216,38	137.730.587.622,73	519.274.914.593,65	377,02
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3.2	657.005.502.216,38	137.730.587.622,73	519.274.914.593,65	377,02
JUMLAH PENDAPATAN - LO	5.4.2	5.633.043.126.549,64	6.072.732.381.987,25	(439.689.255.437,61)	(6,91)
BEBAN	5.4.2				
BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.647.571.488.307,00	1.650.488.776.587,00	(2.927.288.280,00)	(0,18)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.093.715.162.434,06	1.273.341.369.470,21	(179.626.207.036,15)	(14,11)
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	95.355.621.534,00	75.368.890.530,00	19.986.731.004,00	26,52
Beban Hibah	5.4.2.1.4	401.433.078.442,80	652.312.293.535,00	(250.879.215.092,20)	(38,46)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	30.275.654.958,00	29.652.372.000,00	623.282.958,00	2,07
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	23.953.553,94	1.204.537.397,33	(1.180.583.843,39)	(99,04)
JUMLAH BEBAN OPERASI	5.4.2.2	3.268.374.609.229,80	3.682.388.239.499,54	(414.013.630.269,74)	(12,64)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.3				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.3.1	219.273.135.599,82	201.095.532.536,43	18.177.602.063,39	9,04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.3.2	42.232.232.156,89	58.798.324.419,89	(16.566.092.262,99)	(38,75)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.3.3	190.232.842.015,95	191.145.467.957,96	(913.625.942,01)	(0,48)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.3.4	936.998.599,19	212.099.743,62	724.878.855,57	341,76
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.4.2.3.5	165.571.931,50	4.268.794.749,69	(4.103.222.817,99)	(96,12)
Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.3.6	3.892.740.099,74	3.892.740.099,74	-	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.4	476.738.491.988,09	455.508.600.416,80	21.229.891.571,29	4,46
BEBAN TRANSFER	5.4.2.5				
Beban Bagi Hasil	5.4.2.5.1	498.146.936.328,00	911.842.572.594,00	(413.695.636.266,00)	(45,37)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.5.2	322.491.800.904,34	561.063.968.452,82	(238.567.167.548,48)	(42,52)
JUMLAH BEBAN TRANSFER	5.4.2.6	820.638.737.232,34	1.472.896.541.046,82	(652.257.803.784,48)	(44,26)
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.7				
Beban Tak Terduga	5.4.2.7.1	3.405.377.000,00	20.000.000,00	3.385.377.000,00	16,926,89
JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.8	3.405.377.000,00	20.000.000,00	3.385.377.000,00	16,926,89
JUMLAH BEBAN	5.4.3	4.569.155.215.450,23	5.610.813.380.933,16	(1.041.658.165.482,93)	(18,57)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.4	1.063.887.911.099,41	461.919.011.054,09	601.976.900.045,32	134,65
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.1.1	2.671.235.070,06	1.429.299.326,64	1.241.935.743,42	86,90
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.2	2.671.235.070,06	1.429.299.326,64	1.241.935.743,42	86,90
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.3				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.3.1	361.943.652.308,75	43.026.704.657,71	318.916.947.651,04	741,21
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.4	361.943.652.308,75	43.026.704.657,71	318.916.947.651,04	741,21
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	(39.707.417.238,69)	(41.597.445.331,07)	17.929.918.092,38	763,89
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.6	724.615.493.860,72	429.321.555.723,02	295.293.938.137,70	72,40

Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Reff	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	14.045.595.713.196,00	13.170.046.237.337,80
Surplus/Defisit - LO	5.6.2	724.615.493.860,72	420.321.555.723,02
RAP PPKD		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN		-	-
MENDASAR	5.6.3	(104.452.580.906,03)	455.227.920.135,14
Koreksi Nilai Persediaan		(1.520.818.588,02)	20.453.573,00
Lain-lain		(102.931.762.318,01)	455.207.466.562,14
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6.4	14.665.758.626.150,70	14.045.595.713.196,00

Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Reff	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas:	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	1.541.673.476.325,25	2.157.532.293.945,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	79.022.419.102,85	79.460.801.542,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	127.241.046.476,91	120.935.677.611,93
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	89.190.692.234,58	120.599.940.884,15
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	104.421.723.600,00	114.258.373.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	37.128.000,00	100.412.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	1.345.942.438.536,00	1.337.180.068.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	586.330.809.028,00	674.709.425.040,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.9	976.134.243.366,00	1.396.157.452.432,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.10	8.452.393.000,00	12.089.917.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	5.5.1.1.11	963.805.631,00	983.805.230,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.12	7.302.299.000,00	8.084.153.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Masuk		4.866.730.595.300,59	6.021.952.319.745,08
Arus Keluar Kas:	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	1.647.593.991.609,00	1.651.782.965.460,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	1.078.988.412.794,18	1.155.896.100.440,35
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.3	95.355.621.534,00	75.368.890.530,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	405.156.875.823,00	653.554.770.630,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	30.275.654.958,00	53.305.675.334,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	322.491.800.904,34	561.063.968.452,82
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.7	3.405.377.000,00	20.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.8	541.272.131.059,00	870.359.406.509,00
Jumlah Arus Keluar Kas		4.124.539.885.881,52	5.021.341.777.356,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	742.190.709.419,07	1.000.610.542.388,91
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas:	5.5.2.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.1	-	25.000.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	1.008.472.400,00	2.645.996.016,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	1.491.175.625,00	195.750.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.4	220.324.999,00	251.105.500,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.5	71.500.000,00	360.676.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.791.473.024,00	3.478.527.516,00
Arus Keluar Kas:	5.5.2.2		
Perolehan atas Tanah	5.5.2.2.1	122.858.100,00	35.792.256.126,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	165.720.594.811,00	204.099.193.397,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	198.928.668.596,00	220.538.449.546,95
Perolehan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.4	232.553.303.352,00	182.299.322.051,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	8.463.832.246,00	11.562.606.421,00
Perolehan atas Aset Lainnya	5.5.2.2.6	277.000.000,00	4.861.483.400,00
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	155.000.000,00,00	200.000.000,00,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.8	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		763.566.257.104,00	861.653.310.940,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(672.083.233.080,00)	(851.130.824,95)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas:	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.1.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.2	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.3	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.4	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.1.5	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.1.6	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1.7	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1.8	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.9	-	